

KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK DAERAH PERBATASAN: Relevansinya Program Pemberdayaan (Kajian di Kabupaten Keerom Provinsi Papua berbatasan dengan PNG)

Muchtar

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan dan relevansinya program pemberdayaan. Pendekatan dalam kajian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan demikian dimungkinkan diperoleh kedalaman informasi tentang kebutuhan dasar mereka. Informan dalam kajian ini ditentukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan mereka memahami secara baik kebutuhan masyarakat daerah perbatasan. Atas dasar itu, informan dalam kajian ini adalah aparat dari instansi terkait setempat Dinas Kessos Provinsi Papua & Kabupaten Keerom, serta aparat dari Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua. Sebagai alat analisis, digunakan kerangka teori pemberdayaan penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Hasil kajian menunjukkan, adanya ketidakberdayaan mereka sebagai sebab akibat yang saling berhubungan dari kemiskinan dan keterisolasian. Hal ini setidaknya terlihat, bahwa pada umumnya mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang minim, dan sarana-prasarana umum diantaranya: jalan, transportasi, komunikasi yang kurang memadai bahkan tidak tersedia yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat. Jika mengacu pada skala prioritas, maka papan (perumahan) yang pertama-tama perlu mendapat perhatian, yang disusul kemudian bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana umum berupa jalan, transportasi, penerangan listrik, serta sarana komunikasi (kebutuhan). Potensi alam yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi adalah: Jagung, Ubi Kayu, Sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Atas realitas itu, program pemberdayaan bagi penduduk di daerah perbatasan menjadi semakin relevan. Dalam konteks Depsos, program-program pemberdayaan melalui unit operasional terkait Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Pemberdayaan Keluarga, dan lainnya perlu lebih ditingkatkan dan dapat saling bersinergi.

I. PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara kontinental berbatasan dengan: Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sedangkan secara maritim berbatasan dengan: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, dan RDTL (<http://www.tnial.mil.id.>, 2006). Secara geografis wilayah perbatasan darat umumnya berbukit, berhutan lebat, bersungai, dan sebagian berawa-rawa. Topografi yang demikian menyebabkan wilayah perbatasan sulit dijangkau dan kurang tersentuh oleh pembangunan, sebaliknya sangat mudah menjadi pintu masuk unsur luar secara ilegal.

Secara demografis penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan kurang proporsional. Di wilayah perbatasan darat seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur jumlah penduduknya sedikit, sebarannya sangat jarang, dan bahkan sangat sporadik, sedangkan pada perbatasan laut, seperti di pulau-pulau terluar bahkan tidak berpenghuni (KRA XXXVIII Lemhanas R.I., 2004).

Kendala geografis dan demografis tersebut masih diperburuk oleh antara lain: (a) kebijakan pembangunan yang hingga saat ini belum berpijak ke kawasan perbatasan, (b) kemiskinan di sepanjang daerah perbatasan, dan (c) terbatasnya ketersediaan prasarana

sarana dan lain sebagainya (Depdagri, 2005: 56-71). Abdulhadi (2006) telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan di daerah perbatasan, antara lain: pergeseran batas negara, minimnya pembangunan infrastruktur, kesenjangan kehidupan dengan negara tetangga, arus informasi dari dalam negeri sangat kurang dan lebih deras arus dari negeri tetangga, kemiskinan penduduk, sampai kurangnya perhatian dari sektor-sektor terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Sementara itu, Haba (2006) yang membidangi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan mengemukakan, secara psikologis masyarakat yang tinggal di perbatasan tidak merasa bagian warga NKRI karena tidak diperhatikan (Media Indonesia, 2 Jan. 2006).

Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah (BPKD) Papua (2006) menggambarkan, kawasan perbatasan sebagai kawasan yang multi potensi, yakni: potensi (ekonomi) jika dikembangkan, dan potensi terjadinya konflik jika tidak ditangani secara tepat. Pemerintah (Pusat) melalui Menko Polhukam juga menegaskan, masalah perbatasan saat ini merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus. Rencana pembangunan itu antara lain: peningkatan keamanan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta penyediaan navigasi pelayaran (Media Indonesia, 30 Jan. 2006).

Sejalan dengan pemikiran itu, pemberdayaan penduduk di kawasan perbatasan, terutama perbatasan Papua PNG perlu mendapat perhatian secara lebih sungguh-sungguh. Kajian ini mencoba menggali kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan, khususnya di Kabupaten Keerom yang secara kontinental berbatasan langsung dengan PNG sebagai informasi awal yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih intensif oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kelembagaan yang menaruh perhatian pada upaya pemberdayaan penduduk daerah perbatasan sebagai upaya berencana peningkatan taraf kesejahteraan mereka.

II. TELAAH PUSTAKA

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak sederhana, karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta dukungan

pelaksana (*community worker*) yang terlatih. Oleh karena itu diperlukan pemikiran (konsep), strategi, dan langkah secara tepat dan cermat. Sebelum melakukan upaya pemberdayaan memberikan kail kepada penduduk daerah perbatasan, menurut Sachs, penasehat khusus Sekjen PBB yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membantu menjejakkan kaki mereka (*to jump start*) agar mereka mampu berdiri (memancing) (Kompas, 15 Juli: 6, 2005). Setelah keluar dari jebakan kemiskinan, baru dilakukan upaya pemberdayaan.

Secara konsepsional, penanganan penduduk daerah perbatasan dimungkinkan menggunakan paradigma pembangunan sosial dengan strategi pemberdayaan. Pembangunan sosial adalah sebuah paradigma yang memandang dan menempatkan manusia (penduduk perbatasan) sebagai pelaku (subjek) pembangunan. *United Nations Development Programme* (UNDP) memandang, dalam pembangunan manusia diperlukan partisipasi aktif penduduk sejak perumusan, penentuan kebijakan, hingga evaluasi. Disamping itu, juga mengubah peranan masyarakat dari sebagai penerima pasif pelayanan menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan (Moeljarto, 1995: 25). Sedangkan sebagai strategi pembangunan, pemberdayaan merupakan kegiatan membantu *beneficiaries* (klien) untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266). Sementara itu Ife (1995: 182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Friedmann (1992) dalam Pranarka & Moeljarto (1996: 61-62), menempatkan rumah tangga sebagai basis utama pemberdayaan, yaitu sebagai kekuatan sosial, politik, dan psikologis. Menurutnya, kekuatan sosial

menyangkut kemampuan rumah tangga dalam mengakses dasar-dasar produksi, meliputi: informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan. Apabila ekonomi rumah tangga itu meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Sedangkan kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depannya. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan kekuatan untuk menjadi *vocal* dan bertindak secara kolektif. Selanjutnya, rumah tangga juga mengandalkan kekuatan psikologis berupa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan (Sutrisno, 2000: 185). Sejalan dengan pemikiran itu, Kusnaka (dalam Hikmat, 2001: xi) mengemukakan, dalam konsep pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan masyarakat berbeda-beda antar para ahli, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada partisipasi dan kemandirian, sehingga mereka

diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depannya.

III. METODELOGI KAJIAN

A. Jenis dan pendekatan

Jenis kajian ini adalah deskriptif, dimana data yang dihasilkan berbentuk deskripsi berupa data tertulis maupun kata-kata lisan dari perilaku orang-orang atau kelompok orang yang diamati (Bogdan & Taylor dalam Moleong 2000: 3). Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang (Danim, 2002: 61). Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dan lapangan, dokumen pribadi, nota, dan catatan lain-lain.

B. Lokasi dan waktu

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Keerom, dengan pertimbangan bahwa daerah ini khususnya Distrik Arso, Web, Senggi, dan Waris secara kontinental berbatasan langsung dengan negara PNG. Kajian ini dilaksanakan pada pekan ketiga Mei 2006.

C. Pemilihan informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, artinya dalam studi ini, informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan kajian. Untuk itu, informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang mengetahui secara baik kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan. Informan tersebut terdiri dari aparat instansi sosial Provisi Papua, Kabupaten Keerom, dan aparat Badan Perbatasan dan Kerjasama Provisi Papua.

D. Teknik pengumpulan dan analisis data

Untuk mengumpulkan data di lapangan digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, dimaksudkan untuk mendapat informasi kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan dari para informan.

b. Dokumentasi, dimaksudkan untuk meng-himpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: arsip yang relevan, dan lainnya. Dalam konteks ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data antara lain: data wilayah (kecamatan/desa) yang berbatasan langsung dengan PNG, data penduduk, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lainnya.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data melalui proses: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik, grafik, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi kajian

Setelah ada kebijakan pemekaran wilayah, dimana Propinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Papua, maka secara administratif Propinsi Papua membawahi satu kota lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Kabupaten ini merupakan pemekaran Kabupaten Jayapura. Luas Kabupaten Keerom adalah 12.008 Km² yang terletak pada garis lintang 141.00 BT dan 3.15 LS dengan batas wilayah: (a) sebelah utara & barat Kabupaten Jayapura; (b) sebelah selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, dan (c) sebelah timur Negara PNG.

Penduduk Kabupaten Keerom berjumlah: 50.075 jiwa (26.476 laki-laki dan 23.599

perempuan), dengan rincian sebagaimana terlihat pada matrik berikut:

Tabel 1: Jumlah penduduk Kabupaten Keerom menurut jenis kelamin per kecamatan:

NO	DISTRIK/KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Skanto	7.457	6.606	14.065
2	Arso	11.857	10.283	22.140
3	Waris	2.031	1.238	4.539
4	Senggi	2.235	2.128	4.363
5	Web	2.626	2.342	4.968
JUMLAH		26.476	23.599	50.08

Sumber: Pemerintah Kab. Keerom, 2006.

Penduduk yang secara kontinental berbatasan langsung dengan negara PNG adalah mereka yang tinggal di bagian timur, yaitu: di Distrik Senggi (Kp. Tefanna dan Kp. Yabanda); di Distrik Web (Kp. Dubu, Kp. Kali Uli, Kp. Towe Opang, dan Kp. Keisenar); dan Distrik Arso (Ds. Yetti, dan Ds. Kibay) yang didiami oleh 878 KK. Mata pencarian penduduk pada umumnya bertani, antara lain: jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Sedangkan hasil berkebun antara lain: kelapa sawit dan kakao. Agama yang dianut penduduk pada umumnya Nasrani khususnya penduduk asli, yang disusul kemudian agama Islam, dan Hindu Bali yang pada umumnya dianut penduduk pendatang (transmigran) khususnya di Distrik Arso dan Skanto.

B. Kebutuhan dasar penduduk

Penduduk di sepanjang kawasan perbatasan ini dalam kondisi ketidakberdayaan (*powerlessness*) sebagai sebab akibat dari kemiskinan dan keterisolasi-an. Mereka pada umumnya tinggal di rumah yang (sangat) sederhana dan kurang memenuhi standar kesehatan, yang terlihat dari ukuran dan konstruksi rumah yang kecil (*gubug*), dinding dan lantai terdiri papan, atap terdiri dari daun rumbia/seng tanpa kamar tidur, tanpa dapur, tanpa kamar mandi/WC, dan tanpa saluran pembuangan limbah keluarga (sanitasi dan lingkungan).

Selanjutnya, tingkat pendidikan penduduk daerah perbatasan pada umumnya masih rendah, yang disebabkan antara lain oleh keterbatasan sarana-prasarana pendidikan (kualitas dan kuantitas), disamping juga keterbatasan tenaga pendidik (kualitas dan kuantitas). Belum memadainya sarana-prasarana pendidikan tersebut terlihat pada data berikut:

Tabel 2: Jumlah fasilitas pendidikan

NO	DISTRIB/KECAMATAN	SD	SLTP	SMU/SMK	JUMLAH
1	Skanto	11	1	1	13
2	Arso	22	4	2	28
3	Waris	6	1	-	7
4	Senggi	6	1	-	7
5	Web	6	1	-	7
Jumlah		51	8	3	62

Sumber: Disdik Kab Keerom, 2006.

Demikian halnya, fasilitas kesehatan (Puskesmas), tenaga medis, paramedis (Dokter, Bidan, Perawat) masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitas. Sarana prasarana umum, jalan umum, angkutan umum, air bersih, dan penerangan listrik juga masih sangat terbatas bahkan belum tersedia (Penjelasan dari para informan).

Berdasarkan realitas kemiskinan yang mendera bagian besar penduduk di daerah perbatasan, mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang minim, dan sarana-prasarana umum/jalan, transportasi, komunikasi, penerangan listrik yang kurang memadai bahkan tidak tersedia, dengan memperhatikan dan mencermati sumber (dana) yang terbatas, maka kebutuhan yang perlu mendapat perhatian baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat adalah program pembangunan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan (sosial) dasar mereka. Jika mengacu pada skala prioritas, maka papan (perumahan) yang pertama-tama perlu mendapat perhatian, yang disusul kemudian bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana umum/jalan, transportasi, penerangan listrik, serta sarana komunikasi.

Terkait dengan perbaikan tempat tinggal/perumahan, Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten Keerom) berencana akan

membangun sejumlah tempat tinggal, setidaknya bagi: (a) 50 KK di Kp Kibay & 40 KK di Dusun Girwaga (Distrik Arso), (b) 22 KK di Dusun Kali Uli (Distrik Web), dan (c) 40 KK di Kp Tefana (Distrik Senggi). Bentuk rumah yang direncanakan diperuntukkan bagi mereka adalah semi permanen (ukuran 6 X 6 M) dengan posisi menghadap ke jalan. Bentuk rumah tersebut terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1:

Model rumah keluarga daerah perbatasan



Sumber: Dokumentasi Dinkessos Kab. Keerom, 2006.

Potensi alam yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dapat dilakukan oleh penduduk setempat sebagai sumber ekonomi antara lain: jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Sedangkan hasil perkebunan antara lain: kelapa sawit dan kakao. Disamping potensi ekonomi yang bergantung pada alam tersebut yang juga potensial untuk dikembangkan adalah usaha kecil-kecilan (warung kelontong/sembako)/perdagangan.

Atas dasar itu, kepada berbagai pihak yang bermaksud melakukan upaya pemberdayaan di daerah perbatasan dimaksud, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, bantuan stimulan yang merupakan bagian integral upaya pemberdayaan itu dalam bentuk peralatan pertanian/perkebunan, perdagangan dan atau material yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan, bahwa penduduk di sepanjang kawasan perbatasan Keerom-PNG adalah ketidakberdayaan mereka yang merupakan sebab akibat dari kemiskinan dan keterisolasian. Hal ini terlihat dari kondisi tempat tinggal (rumah) mereka yang tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang minim, dan sarana-prasarana umum/jalan, transportasi, komunikasi yang kurang memadai bahkan tidak tersedia sebagai kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat. Untuk itu, kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat) adalah pembangunan (program pemberdayaan) yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan (sosial) dasar mereka. Potensi alam daerah perbatasan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi antara lain: jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Sedangkan hasil berkebun antara lain: kelapa

sawit dan kakao. Berdasarkan realitas lapangan itu, program pemberdayaan berdasarkan *need assessment* daerah perbatasan menjadi semakin relevan.

2. Saran

Pemerintah Pusat perlu segera merealisasikan program pembangunan (pemberdayaan) baik secara nasional maupun sektoral (departemental) yang diarahkan kepada penduduk daerah perbatasan. Demikian halnya Pemda setempat, dengan segala daya perlu mulai memperhatikan (member-dayakan) penduduk daerah perbatasan. Dalam konteks Depsos, upaya pemberdayaan melalui unit operasional terkait, misalnya: Dit. KAT, Dit. Pemberdayaan Fakir Miskin, Dit. Pemberdayaan Keluarga, dan lainnya kiranya perlu lebih ditingkatkan dan saling disinergikan. Dengan demikian diharapkan, pemihakan terhadap mereka menjadi lebih proporsional yang pada akhirnya upaya pemberdayaan/peningkatan taraf kesejahteraan mereka benar-benar merupakan upaya nyata, dan bukan retorika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Depsos R.I., Ditjen. Pemberdayaan Sosial, Dit. Pemberdayaan Peran Keluarga. (2002). *Pola Operasional Program Pemberdayaan Peran Keluarga*. Jakarta.
- Depdagri, Ditjen. Pemerintahan Umum, Dit. Wilayah Administrasi dan Perbatasan (2005). *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*. Jakarta.
- <http://www.tnial.mil.id>
- Ife, Jim. (1995). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*, Australia, Longman Pty Ltd.
- KOMPAS, 2 Febr. 2006. *Daerah Perbatasan kurang diperhatikan pemerintah*.
- KOMPAS, 30 Jan 2006. *Perbatasan belum diperhatikan*.
- Lemhanas R.I. 2004. KRA XXXVIII.
- Moeljarto, T. 1995. *Politik pembangunan, sebuah analisis, konsep, arah, dan strategi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

MEDIA INDONESIA, 20 Jan. 2006. *Memberdayakan Perbatasan.*

MEDIA INDONESIA, 2 Febr. 2006. *Daerah Perbatasan Berpotensi Lepas dari NKRI.*

Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory.* Second edition. London: MacMillan Press Ltd.

Pemda Kabupaten Keerom. 2006. *Proposal Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.*

BIODATA PENULIS:

Mughtar, Magister Sosiologi kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ajun Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.